

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP)
TAHUN 2024**



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2025
Jl. Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang
Muara Sabak Barat



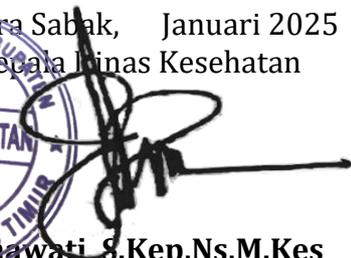
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami diberi kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka kesempurnaan penyusunan laporan ini ditahun mendatang.

Muara Sabak, Januari 2025
Kepala Dinas Kesehatan



Ernawati S. Kep. Ns. M. Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690617 199502 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum Organisasi.....	2
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.4 Struktur Organisasi.....	6
1.5 Sumber Daya Manusia.....	8
1.6 Sarana dan Prasarana.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.1.1 Visi.....	11
2.1.2 Misi.....	12
2.1.3 Tujuan.....	12
2.1.4 Sasaran dan Indikator Kinerja.....	13
2.1.5 Program Kerja.....	13
2.1.6 Strategi dan Kebijakan.....	14
2.2 Penetapan Kinerja.....	15
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Indikator Kinerja.....	17
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	25
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	35
3.4 Strategi dan Pemecahan Masalah.....	40
BAB 4 PENUTUP.....	42



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024	8
TABEL 2. Kualifikasi Tenaga Medis dan Non Medis Di Puskesmas Tahun 2024	9
TABEL 3. Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024	9
TABEL 4. Program Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026	13
TABEL 5. Matrik Penetapan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2024	16
TABEL 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	18
TABEL 7. Pengukuran Capaian Sasaran dan Indikator sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.....	18
TABEL 8. Pengukuran Capaian Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024	19
TABEL 9. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	26
TABEL 10 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 s/d 2024.....	26
TABEL 11 Perbandingan Capaian Indikator IKS dengan Provinsi dan Nasional.....	28
TABEL 12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	29
TABEL 13 Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tahun 2023 s/d 2024.....	30
TABEL 14 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	32
TABEL 15 Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2003 s/d 2024.....	32
TABEL 16. Capaian Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024.....	35
TABEL 17. Target dan Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2024.....	39
TABEL 18. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung jabung timur Tahun 2024.....	40



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2024 7



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024
- Lampiran 2 : Cascading Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024
- Lampiran 3 : Pohon Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026
- Lampiran 4 : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026



BAB 1

PENDAHULUAN

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program kerjanya mempunyai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang termasuk didalamnya fungsi dan tugas pokok serta rencana kerja ke dalam sebuah akuntabilitas yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam bentuk pelaksanaan program dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024. Hal ini merupakan perwujudan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari kolusi, Korupsi dan nepotisme dan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Penyusunan Laporan Kinerja sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

- 1) Sebagai laporan, Laporan Kinerja adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
- 2) Sebagai laporan akuntabilitas, laporan kinerja merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
- 3) Laporan Kinerja berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategi dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah.
- 4) Laporan Kinerja merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
- 5) Laporan kinerja juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



Komitmen pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur didalam pembangunan disampaikan melalui Visi “ **Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)**” yang dilengkapi dengan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD perubahan tahun 2021 – 2026. Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki prioritas dan komitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga terwujudnya **Masyarakat Sehat Yang Produktif, Mandiri Dan Sejahtera**.

1.1. Dasar Hukum Organisasi

1. Undang – Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 11).

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Kesehatan mempunyai peranan penting dalam mencapai target Visi dan Misi kepala daerah. Sektor kesehatan merupakan hal yang sangat fundamental dalam suatu pembangunan, baik itu pembangunan daerah maupun nasional. Dinas Kesehatan menjadi ujung tombak dalam menciptakan generasi yang sehat sehingga mampu mewujudkan masyarakat sehat dan mandiri yang nantinya akan berimplikasi kepada majunya pembangunan daerah. Dinas Kesehatan harus mampu melakukan inovasi – inovasi yang mampu diterima masyarakat sehingga masyarakat mau merubah perilaku yang selama ini jauh dari pola hidup sehat.



Langkah strategis yang diambil Dinas Kesehatan tidak hanya bertumpu kepada manusia dan sumber penyakit, tetapi juga langkah strategis dalam mengedukasi masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif sehingga penularan penyakit menular dapat dicegah dan penyakit tidak menular dapat ditekan dengan menerapkan terhadap pola hidup sehat. Upaya ini dituangkan dalam bentuk penyediaan program dan kegiatan yang dibagi dalam beberapa bidang yaitu bidang pelayanan kesehatan, bidang kesehatan masyarakat, bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit. Pelaksanaan program kerja yang terbentuk dalam kegiatan ini mendapat dukungan dana yang tidak hanya bersumber dari APBD tetapi juga dukungan dari APBN.

Program kerja lima tahun Dinas Kesehatan yang disusun berupa Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dalam 1 tahun. Rencana kerja merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berpedoman terhadap rencana startegis dan rencana kerja yang telah ditetapkan maka Dinas Kesehatan juga memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan dalam upaya startegis mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Beberapa permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan saat ini sebagai berikut :

1. Angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi.
2. Kualitas lingkungan masih rendah.
3. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh baik gizi kurang maupun gizi lebih.
4. Penerapan prilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah.
5. Belum optimalnya capaian dan kualitas promosi kesehatan pada kelompok rentan
6. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal.
7. Kualitas SDM kesehatan masih rendah dan penyebaran yang tidak merata.



Untuk mewujudkan tercapainya visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu **“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)”**, maka segala upaya pembangunan yang dilaksanakan dalam membangun daerah harus berimplikasi terhadap pencapaian kesejahteraan seluruh rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan kedalam 4 misi utama yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan.
2. Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan investasi daerah yang kompetitif dan lestari
4. Mewujudkan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dan tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis.

Untuk melaksanakan visi misi kepala daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Kesehatan sebagai salah satu organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 3 (tiga) sasaran pokok pembangunan Kesehatan, yaitu :

1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unit kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :



1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan
2. Penyelenggaraan upaya kesehatan
3. Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
5. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh Bupati
9. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan gizi masyarakat

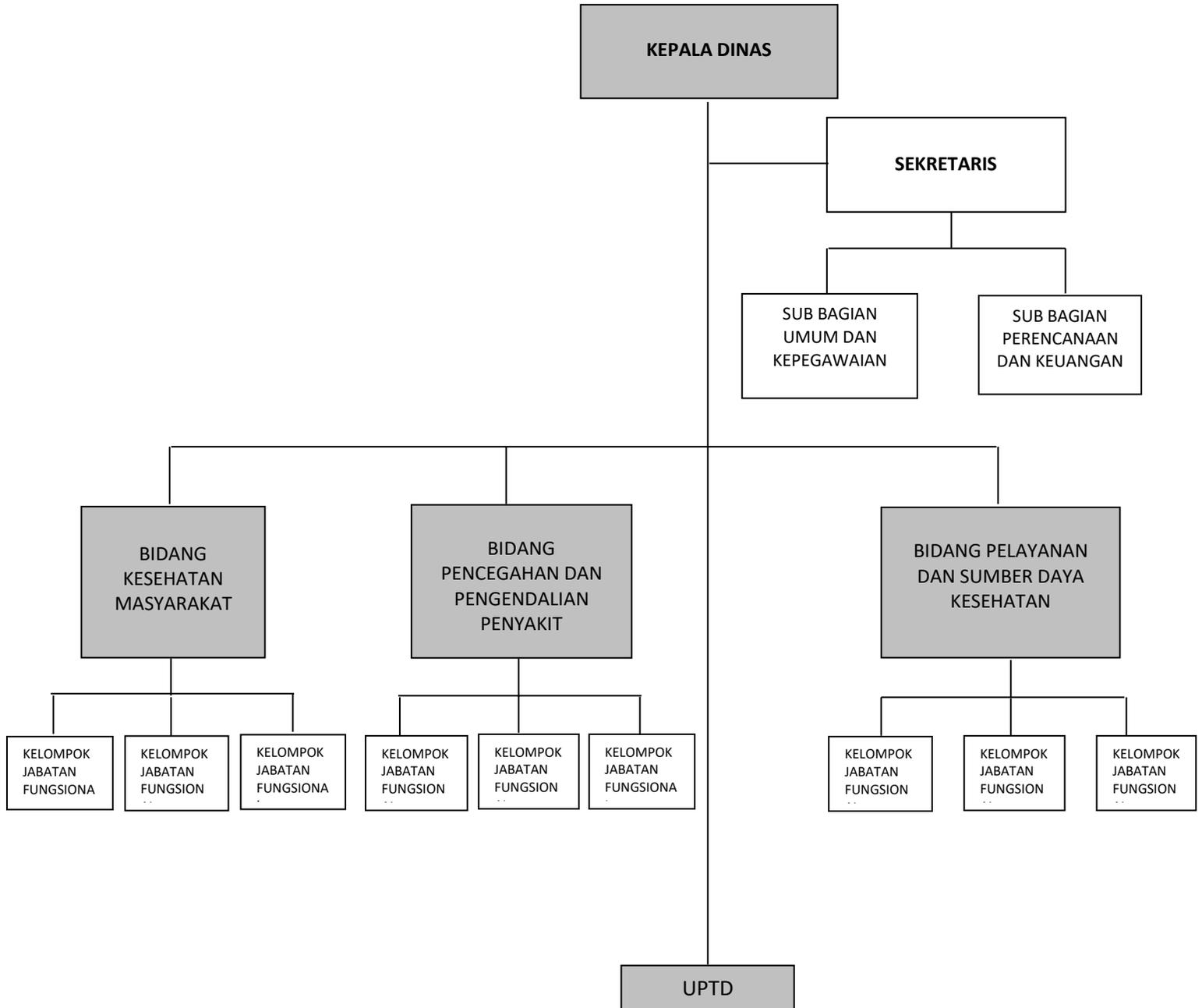
1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 06 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) UPTD



Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024





1.5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kesehatan yang tersedia di Dinas Kesehatan terdiri dari berbagai ilmu pendidikan berlatar belakang kesehatan. Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan memiliki 84 pegawai yang terdiri dari 9 pejabat struktural, 6 pegawai fungsional tertentu, 30 pegawai fungsional umum, 10 orang pegawai PPPK dan dibantu dengan 29 pegawai harian tidak tetap (PHTT).

Tabel -1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH	%
		PNS	PPPK	PHTT		
1	S2 Kesehatan Masyarakat	3	0	1	4	4,76
2	S2 Non Kesehatan	2	0	0	2	2,38
3	Apoteker	3	0	1	4	4,76
4	Ners	1	1	3	5	5,95
5	S1 Kesehatan Masyarakat	22	4	7	33	39,29
6	S1 Non Kesehatan	3	0	3	6	7,14
7	S1 Gizi	0	0	1	1	1,19
8	DIV Kebidanan	0	2	0	2	2,38
9	DIV Keperawatan	0	1	0	1	1,19
10	DIV Kesling	1	0	0	1	1,19
11	DIII Keperawatan	2	1	2	5	5,95
12	DIII Kebidanan	2	1	0	3	3,57
13	DIII Farmasi	3	0	0	3	3,57
14	DIII Kes Lingkungan	2	0	1	3	3,57
15	DIII Gizi	1	0	0	1	1,19
16	D1 Non Kesehatan	0	0	1	1	1,19
17	SMA	0	0	6	6	7,14
18	SMP	0	0	1	1	1,19
19	SD	0	0	2	2	2,38
TOTAL		45	10	29	84	100



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

Tenaga Kesehatan yang ada di 17 Puskesmas Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebanyak 1.022 orang terdiri dari tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga PPPK, tenaga Nusantara Sehat dan Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) yang tersebar dipuskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes.

Tabel -2 :Kualifikasi Tenaga Medis dan Non Medis Di Puskesmas Tahun 2024

NO	KUALIFIKASI TENAGA DI PUSKESMAS	JUMLAH
1	Dokter Umum	39
2	Dokter Gigi	12
3	Apoteker	12
4	Perawat	252
5	Bidan	474
6	Perawat Gigi	30
7	Farmasi	19
8	Kesehatan Masyarakat	39
9	Kesehatan Lingkungan	25
10	Gizi	23
11	Analisis (Laboratorium)	26
12	Dukungan Manajemen	71
Total		1.022

1.6. Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas 18 (UPTD) yang terdiri dari 10 puskesmas perawatan, 7 puskesmas non perawatan dan 1 UPTD Instalasi Farmasi, 58 puskesmas pembantu, 32 polindes dan 23 poskesdes.

Tabel -3 : Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Puskesmas Rawat Inap	10
2	Puskesmas Non Rawat Inap	7
3	Puskesmas Pembantu	58
4	Polindes	32
5	Poskesdes	23
6	Instalasi Farmasi	1
7	Kendaraan roda 4 (ambulans)	20
8	Kendaraan Roda 2	257



1.7. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan
Berisi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud Dan Tujuan, Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Aspek Startegis, dan Sistematika Penulisan
- Bab II : Penetapan Kinerja
Berisi Rencana Strategis, yang menjelaskan Visi, Misi dan Tujuan Rencana Startegis Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan, dan penjelasan Sasaran dan Program serta Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi analisa capaian dari program yang diukur dari Indikator Kinerja Utama disertai dengan penjelasan kendala atau permasalahan dan startegi yang dilakukan untuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja
- Bab IV : Penutup
- Lampiran



BAB 2

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005–2025 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai dengan penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi – tingginya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Mengacu dari RPJMN 2020 – 2024, sasaran pembangunan kesehatan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan yang tertuang di point kedua misi kepala daerah yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Berpedoman dari Visi Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 yaitu “ **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**”. Untuk melaksanakan visi tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjabarkan visi kepala daerah di bidang kesehatan yaitu menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan sejahtera. Melalui bidang kesehatan, masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan memiliki kondisi lingkungan dan perilaku hidup yang sehat, memiliki kemandirian dalam pelayanan kesehatan sehingga menjadi manusia yang produktif dan sejahtera.



2.1.2. Misi

Dalam rangka terwujudnya visi kepala daerah, maka terdapat 4 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan.
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

Memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut diatas terlihat bahwa pembangunan dalam bidang kesehatan dititik beratkan pada prioritas pikiran misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama misi ke-2 yaitu: Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Misi ini ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mendukung misi tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjabarkan misi kepala daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Meningkatkan keluarga sehat dan sadar gizi serta upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh Masyarakat.

2.1.3. Tujuan

Tujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penggerak pembangunan kesehatan menuju terwujudnya masyarakat yang sehat, Produktif, mandiri dan sejahtera adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat.



2.1.4. Sasaran dan Indikator Kinerja

Tercapainya sasaran rencana kerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 dapat diukur dari keberhasilan indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kesehatan masyarakat, dengan indikator sasaran :
 - a. Indeks keluarga sehat dari 0,20% pada tahun 2021 menjadi 0,70% pada tahun 2026
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan indikator sasaran :
 - a. Indeks kepuasan masyarakat dari 89,25% pada tahun 2021 menjadi 89,50% pada tahun 2026
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan indikator sasaran :
 - a. Predikat LAKIP dari CC pada tahun 2021 menjadi A pada tahun 2026
 - b. Laporan keuangan sesuai SAP dari sesuai pada tahun 2021 menjadi sesuai pada tahun 2026

2.1.5. Program Kerja

Untuk mencapai sasaran – sasaran tadi maka Program Dinas Kesehatan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Program Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1. Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat



Sehat	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	1. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 2. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota 3. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 4. Program kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman
	3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat 2. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota

2.1.6. Strategi dan Kebijakan

Kebijakan merupakan penguatan yang diambil sebagai langkah untuk mencapai target capaian dan sasaran yang telah ditetapkan, seperti yang telah dijabarkan di atas tentang strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kebijakan diambil dengan melihat permasalahan yang ada di masyarakat yang kemudian di indentifikasi melalui review pelaksanaan kebijakan sebelumnya. Adapun arah kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah :

1. Penguatan pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup
2. Melakukan percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pencegahan faktor risiko, deteksi dini dan aksi multisektor (GERMAS) dalam meningkatkan uapay pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan
5. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat tanpa meninggalkan upaya kesehatan perorangan
6. Meningkatkan sinergi lintas program, lintas sektor dan swasta dalam pelaksanaan program kesehatan.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan



8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan

Berdasarkan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

1) Peningkatan kesehatan masyarakat

Sasaran peningkatan kesehatan masyarakat, dilaksanakan melalui strategi :

- a. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Sasaran peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dilaksanakan melalui strategi :

- a. Meningkatkan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi sesuai standar
- b. Meningkatkan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan
- c. Meningkatkan fasilitas kefarmasian, alat kesehatan dan makanan sesuai standar

3) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, dilaksanakan melalui strategi :

- a. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
- b. Peningkatan kualitas dan tata Kelola keuangan dan pelaporan
- c. Penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

2.2. Penetapan Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran Indikator Kinerja. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini, di tahun 2024 telah disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen perjanjian kinerja memuat



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja dalam perjanjian kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome dan output.

Penyusunan penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 mengacu kepada RPJMD tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026, Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Matrik Penetapan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Peningkatan Kesehatan masyarakat	1. Indeks keluarga sehat	%	0,60	1. Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat	13.212.013.600
					2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	149.574.400
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat	%	89,45	1. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1.137.058.134
					2. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	11.255.768.540
					3. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	34.561.984.743
					4. Program Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	430.831.000
3	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Predikat AKIP 2. Laporan keuangan sesuai SAP	Predikat	BB Sesuai	1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	63.997.399.667
					2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	631.284.900



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja

Capaian pelaksanaan program kerja Dinas Kesehatan tahun 2024 dilihat dari presentase realisasi dari target yang telah ditetapkan sudah cukup baik. Dinilai dari akuntabilitas kinerja yang mengacu pada Perjanjian kinerja tahun 2024 yang merupakan bentuk komitmen Dinas Kesehatan dalam ikut mendukung Visi Kepala Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengumpulan dan pengolahan data hasil kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2024, merupakan langkah awal dalam penilaian indikator kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Pedoman yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.



Tabel 6
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan OPD di lingkungannya. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja tiap kegiatan untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja mulai dari indikator capaian program sampai ke indikator hasil. Pengukuran hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 7
Pengukuran Capaian Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024			KODE
						% CAPAIAN TARGET	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Faskes dan RS	Angka Harapan Hidup	Peningkatan Kesehatan Masyarakat		tahun	99,49	67,25	67,26	100	Sangat Baik
				Indeks Keluarga Sehat	%	63,6	0,60	0,318	53	Rendah
2	Meningkatnya	Indeks pelayanan			%	100	3,2	3,72	100	Sangat Baik



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

Pelayanan Publik dan Budaya Kerja	publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	89,45	91,14	100	Sangat Baik
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat AKIP	predikat	100	BB	BB	100	Sangat Baik
			Laporan Keuangan Sesuai SAP		100	Sesuai	Sesuai	100	Sangat Baik

Tabel 8
Pengukuran Capaian Program/Kegiatan dan Indikator Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Tahun 2023
1	2	3	7	8	9=8/7*100	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS PELAYANAN INSTANSI	89,45%	90,5%	100%	100%
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku	100%	100%	100%	100%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen)	9	9	100%	100%
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1	1	100%	100%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%
1.2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	585	1052	100%	100%
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	100%	100%
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	96,6%
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	105	105	100%	100%
1.3.2	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	100%	100%
1.3.3	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Kesehatan, Terselenggaranya Pelatihan Singkat Tenaga Kesehatan	100	100	100%	90%
1.3.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	45 org	45 org	100%	100%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100%	100%	100%	91,6%
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan (Paket)	1	1	100%	100%
1.4.2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kebersihan dan alat tulis kantor (Tahun)	1	1	100%	100%



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Tahun 2023
1	2	3	7	8	9=8/7*100	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yan disediakan	1	1	100%	0%
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakn Dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan (Paket)	1	1	100%	100%
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang - Undangan	1	1	100%	100%
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kinjungan Tamu (Orang)	1	1	100%	100%
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (bulan)	1	1	100%	100%
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	68,67%
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda-2 dan Roda-4 (Unit)	1	1	100%	100%
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia (paket)	25	25	100%	16%
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya (unit)	20	20	100%	900%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	100%	100%	100%	100%
1.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	1	1	100%	100%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	92,5%	92,5%	77,5%
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	20	17	85%	55%
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15	15	100%	100%
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (paket)	1	1	100%	100%
1.8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	82,4%	82,4%	92,5%
1.8.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100	82,4	82,4%	92,5%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT	JUMLAH KEMATIAN IBU,	5	4	100%	100%
		ANGKA KEMATIAN NEONATAL PER 1000 KELAHIRAN HIDUP (KH),	7.0/1000 KH	4.20/1000 KH	100%	83,62%
		ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1000 KELAHIRAN HIDUP	16.0//1000 KH	4.20/1000 KH	100%	88,54%
		ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1000 KELAHIRAN HIDUP	18.5/1000 KH	4.20/1000 KH	100%	92,19%



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Tahun 2023
1	2	3	7	8	$9=8/7*100$	
		PERSENTASE PELAYANAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	85%	82,33%	96,85%	89,93%
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota :	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100%	100%	100%	100%
2.1.1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di bangun	1 Unit	1 Unit	100%	0%
2.1.2	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang di bangun	2 Unit	2 Unit	100%	0%
2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	1 Unit	100%	0%
2.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	100%	100%
2.1.5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan di FKTP	25 Paket	25 Paket	100%	0%
2.1.6	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	1 unit	1 unit	100%	0%
2.1.7	Pengadaan Obat, Bahan Pakai Habis, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Pakai Habis, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	240 Item	240 Item	100%	100%
2.1.8	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	1 Unit	1 Unit	100%	100%
2.1.9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	1 Paket	1 Paket	100%	100%
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	91,47%	91,47%	96,86%
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100%	82,33%	82,33%	76,44%
		Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	92,18%	92,18%	97,53%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	94,53%	94,53%	88,18%
		Persentase Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	95,24%	95,24%	91,62%
		Persentase Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	62,54%	62,54%	52,7%
		Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	87,57%	87,57%	80,27%
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	30,69%	30,69%	27,1%



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Tahun 2023
1	2	3	7	8	$9=8/7*100$	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	164,03%	164,03%	100%
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	93,29%	93,29%	93,41%
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	72,82%	72,82%	41,37%
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	78,19%	78,19%	66,75%
		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	6,93	6,20	100%	100%
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	2,6	3,5	72,28%	100%
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada balita	16,05	23,7	71,94%	35,78%
		Persentase Desa UCI/ Kelurahan UCI	95,7	93,5	97,70%	89,85%
		Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi	95,3	88,8	93,18%	100%
		Persentase anggota keluarga tidak ada yang merokok	79	52,76	66,79	69,33
		Persentase keluarga mempunyai akses sarana air bersih	75	72,14	96,19%	100%
		Cakupan Keluarga Terhadap Sanitasi Layak	77	44,21	57,42%	100%
		Cakupan Desa ODF	50	54	100%	95%
		Persentase Balita 0-6 Bulan Mendapatkan ASI Eksekutif	66	79,24	100%	100%
		Jumlah Posyandu Aktif	239	285	100%	100%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100	100	100%	100%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin	4,9	4,7	95,92%	12,88%
		Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang diintegrasikan sebagai Peserta JKN KIS	85	87,87	100%	99%
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	3906	3573	91,47%	96,86%
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	3729	3070	82,33%	76,44%
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	3569	3290	92,18%	97,53%
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	16.132	15.250	94,53%	88,18%
2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	38.656	36.816	95,24%	92,28%



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Tahun 2023
1	2	3	7	8	9=8/7*100	
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	155.701	97.380	62,54%	52,68%
2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	26.088	22.844	87,57%	80,27%
2.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	57.809	17.743	30,69%	27,06%
2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	909	1491	100%	100%
2.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	432	403	93,29%	93,41%
2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	3230	2352	72,82%	41,37%
2.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	5455	4265	78,19%	66,75%
2.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	4	100%	100%
2.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	100%	100%
2.2.15	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	100%	100%
2.2.16	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	100%	100%
2.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50	40	80%	80%
2.2.18	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5	5	100%	100%
2.2.19	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan	1	1	100%	100%
2.2.20	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	1	1	100%	100%
2.2.21	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	100%	100%
2.2.22	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Puskesmas	1	1	100%	100%
2.2.23	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	17	17	100%	77,77%
2.2.24	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	17	17	100%	0%



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Tahun 2023
1	2	3	7	8	9=8/7*100	
2.2.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	1	1	100%	0%
2.2.26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1	1	100%	0%
2.2.27	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1	1	100%	0%
2.2.28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV ODHIV	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV ODHIV	1	1	100%	0%
2.2.29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1	1	100%	0%
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	90%	100%	100%	100%
2.3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Sistem Informasi Puskesmas 	1 Dokumen 17 Puskesmas	100	100%	100%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN	85%	105%	100%	80,21%
		JUMLAH PUSKESMAS DENGAN 9 JENIS TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR	14	14	100%	58,33%
3.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota :	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	70,59	70,6	100%	70%
3.1.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	259	482	100%	100%
3.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17	17	100%	100%
3.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	82,26	100	100%	86,85%
3.3.1	Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40	76	100%	60,31%
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS	100%	100%	100%	96,89%
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek dan Toko Obat yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan	100%	100%	100%	100%
4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	1	1	100%	100%



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Tahun 2023
1	2	3	7	8	9=8/7*100	
4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang bersertifikat/ memiliki izin Produksi	68,23	100	100%	90,66%
4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	1	100%	100%
4.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dimasyarakat	35,02	100	100%	100%
4.3.1	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	25	48	100%	71,43%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE RUMAH TANGGA PHBS	51,70%	59,3%	100%	100%
5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang menerapkan Kebijakan Hasil Advokasi, Pemberdayaan dan Kemitraan	9	7	77,7%	100%
5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100%	100%
5.2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	78,97	99%	100%	100%
5.2.1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Program					95,6	86,92

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut diatas kemudian dilakukan analisis pada setiap sasaran strategis untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung serta faktor penghambat terhadap kinerja



yang diharapkan. Adapun evaluasi secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

1) Sasaran Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Tolak ukur capaian sasaran Peningkatan Kesehatan masyarakat diukur dengan indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS). Rumusan indikator dan formulasi perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR SASARAN
1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Indekas Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga Sehat dengan IKS > 0,800 dibagi jumlah keluarga pada wilayah tertentu

Indikator keberhasilan sasaran dilihat dari perbandingan target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 s/d 2024

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Indeks keluarga sehat	%	0,50	0,318	63,6%	0,60	0,318	53%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja Indeks Keluarga Sehat belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu target sebesar 0,60% dengan realisasi hanya 0,318% dengan capaian kinerja sebesar 53%. Dibandingkan tahun 2023 capaian kinerja dari indikator Indeks Keluarga Sehat mengalami penurunan, yang mana pada tahun 2023 capaian kinerja Indeks Keluarga Sehat sebesar 63,6%. Hal ini dikarenakan oleh program dan kegiatan yang dilakukan di puskesmas dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) belum berjalan secara optimal. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan intervensi terhadap keluarga-keluarga yang memiliki masalah kesehatan sesuai dengan indikator PIS-PK dan Standar Pelayanan Minimal. Sasaran ini dicapai melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor.



Analisa Indikator sasaran strategis peningkatan Kesehatan Masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut. Program Indonesia Sehat (PIS) diselenggarakan melalui Pendekatan Keluarga (PK) bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan agar tercapai Indonesia Sehat dengan cara mengintegrasikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) secara berkesinambungan dengan target keluarga melalui kunjungan rumah sehingga setiap anggota rumah tangga dapat terpantau kondisi kesehatannya. Selain itu, tujuan PIS-PK adalah untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga, puskesmas juga akan mendapatkan perencanaan kegiatan yang lebih tepat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja masing – masing.

Kegiatan PIS PK masih tetap dilaksanakan oleh puskesmas, ditengah kesibukannya melaksanakan tugas kegiatan lain. Capaian IKS didapatkan dari Aplikasi Keluarga Sehat, yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Puskesmas. Kendala yang paling sering dialami adalah aplikasi Keluarga Sehat tidak real time menangkap perubahan data yang dilaksanakan oleh puskesmas, sehingga data-data yang diinput tidak dapat ter-update secara langsung meskipun sudah melaksanakan update data intervensi lanjutan, sehingga nilai IKS tidak ada peningkatan. Dengan kondisi seperti itu, Aplikasi Keluarga Sehat terkesan cukup lambat pergerakannya sehingga apa yang diinputkan tidak langsung ter-update bahkan hingga beberapa bulan. Kendala lainnya adalah adanya perbedaan data di aplikasi dengan data yang diinput manual oleh petugas. Selain itu, beberapa warga meninggal, pindah, atau sedang bekerja ketika dilakukan intervensi, sehingga kesulitan dalam tindak lanjut intervensi.

Dalam upaya meningkatkan capaian indikator sasaran kinerja cakupan keluarga dengan indikator keluarga sehat adalah realisasi data sasaran ke Kemenkes dikarenakan data sasaran sudah berubah dari sasaran awal PIS PK dan intervensi PIS PK dilaksanakan dengan koordinasi insentif lintas program



disesuaikan dengan indikator PIS-PK yang mempunyai daya ungkit lebih besar dalam menaikkan IKS, termasuk dengan inovasi - inovasi yang ada di puskesmas.

Adapun perbandingan capaian indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) dengan provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11
Perbandingan Capaian Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2024

NO	INDIKATOR	KAB TANJUNG JABUNG TIMUR (%)	PROVINSI JAMBI (%)	NASIONAL (%)	KETERANGAN
1	Keluarga Mengikuti Program KB	64,19	57,90	56,76	Tercapai
2	Persalinan Ibu di Fasyankes	74,39	86,05	90,56	Belum Tercapai
3	Bayi Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	92,73	91,72	93,44	Belum Tercapai
4	Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif	79,23	82,15	84,29	Belum Tercapai
5	Pertumbuhan Balita dipantau	85,15	84,36	90,61	Belum Tercapai
6	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	62,60	35,45	44,78	Tercapai
7	Penderita Hipertensi yang berobat teratur	44,52	32,01	33,08	Tercapai
8	Penderita gangguan jiwa berat di obati dan tidak diterlantarkan	59,07	22,17	27,81	Tercapai
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	52,76	45,12	48,89	Tercapai
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	55,52	48,28	59,85	Belum Tercapai
11	Keluarga memiliki akses/ menggunakan sarana air bersih	62,48	88,89	94,29	Belum Tercapai
12	Keluarga memiliki akses/ menggunakan jamban keluarga	75,86	86,62	89,21	Belum Tercapai
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,318	0,206	0,273	Tercapai

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian dari masing- masing indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada tahun 2024, dilihat perbandingan antara capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Nasional, capaian masing – masing indikator bervariasi, dimana untuk lima indikator yaitu Keluarga mengikuti program KB, Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar, Penderita Hipertensi yang berobat teratur, Penderita Gangguan Jiwa Berat diobati dan tidak terlanjar, dan indikator Anggota Keluarga tidak ada yang merokok capaian kabupaten Tanjung Jabung Timur diatas rata-rata capaian Indeks Keluarga Sehat Provinsi Jambi dan rata-rata capaian Nasional, dan untuk tujuh indikator lainnya yaitu Persalinan Ibu di Fasyankes, Bayi mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, Bayi mendapatkan



ASI Eksklusif, Pertumbuhan Balita dipantau, Keluarga sudah menjadi anggota JKN, Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih dan Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga capaian kabupaten Tanjung Jabung Timur masih dibawah rata-rata capaian Indeks Keluarga Sehat Provinsi Jambi dan rata-rata capaian Nasional.

Dana yang ditargetkan untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 13.361.588.000,- dengan realisasi Rp. 11.450.300.542,- (85,70%).

Keberhasilan sasaran ini didukung oleh beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Program pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.212.013.600,- dan realisasi sebesar Rp. 11.365.750.542,- (86,03%)
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 149.574.400,- dan realisasi sebesar Rp. 84.550.000,- (56,53%)

2) Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Tolak ukur capaian sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Rumusan indikator dan formulasi perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR SASARAN
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Indekas Kepuasan Masyarakat	Total dari nilai persepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai perimbang, kemudian hasil nilai indeks dikonversi dengan dikali nilai dasar (25)

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 13
Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Tahun 2023 S/D 2024

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
1	Indeks kepuasan masyarakat	%	89,35	91,97	100%	89,45	91,14	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target kinerja yaitu sebesar 91,14% dengan target capaian sebesar 89,45% dan capaian kinerja 100% . Dibandingkan dengan tahun 2023 capaian kinerja juga 100%, dengan realisasi 91,97%. Hal ini dapat tercapai didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana di seluruh puskesmas, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan melalui pelatihan tenaga kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan melalui nusantara sehat dan pengangkatan tenaga honorer. Pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai di puskesmas melalui pengadaan dari APBD, DAK ataupun dropping dari pusat. Dengan terpenuhinya ini tentunya puskesmas dapat melaksanakan pelayanan baik di dalam maupun di luar gedung kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Analisa dari Indikator sasaran dari sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan pengukuran indeks kepuasan Masyarakat dilakukan melalui survei kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri setiap tahun di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dari hasil survei yang didapat kemudian ditindaklanjuti oleh unit pelayanan publik untuk dilakukan perbaikan terhadap unsur penilaian yang masih dianggap kurang oleh masyarakat.

Sebagai bagian perbaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka upaya-upaya peningkatan pelayanan publik senantiasa akan terus dilakukan. SKM merupakan salah satu upaya tersebut serta dapat digunakan untuk mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan



publik maupun sebagai bahan pengambilan kebijakan sebagai langkah perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran kinerja yang dapat menilai kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui sarana pelayanan kesehatan. Dimana tingkat kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan dari fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Tingkat pelayanan juga dipengaruhi oleh sumber daya kesehatan serta sarana dan prasarana pendukung yang ada difasilitas pelayanan kesehatan. Semakin terpenuhinya sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan maka semakin baik pelayanan kesehatan terhadap Masyarakat.

Untuk memenuhi kualitas maupun kuantitas sumber daya kesehatan serta pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mendukung dengan peningkatan sarana dan prasarana di seluruh puskesmas, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan melalui pelatihan tenaga kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan melalui nusantara sehat dan pengangkatan tenaga honorer. Pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai di puskesmas melalui pengadaan dari APBD, DAK ataupun dropping dari pusat. Dengan terpenuhinya ini tentunya puskesmas dapat melaksanakan pelayanan baik di dalam maupun di luar gedung kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dana yang ditargetkan untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 47.385.642.417,- dengan realisasi Rp. 42.872.548.681,- (90,69%).

Keberhasilan sasaran ini ditunjang oleh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.255.768.540,- dan realisasi sebesar Rp. 9.359.135.642,- (83,15%)
- b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 34.561.984.743,- dan realisasi sebesar Rp. 32.190.712.913,- (93,14%)
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.137.058.134,- dan realisasi sebesar Rp.



1.042.610.051,- (91,69%)

- d. Program kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 430.831.000,- dan realisasi sebesar Rp. 380.090.075,- (88,22%)

3) Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tolak ukur capaian sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan diukur dengan indikator Predikat AKIP dan Laporan Keuangan Sesuai SAP. Rumusan indikator dan formulasi perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR SASARAN
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat AKIP	Penilaian hasil laporan kinerja instansi perangkat daerah oleh pihak berwenang
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penilaian laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Tahun 2023 S/D 2024

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA
1	Predikat AKIP	predikat	B	BB	100%	BB	BB	100%
2	Laporan Keuangan sesuai SAP		Sesuai	Sesuai	100%	Sesuai	Sesuai	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 2 indikator kinerja yang ada, dimana penjelasan dari masing-masing indikator sebagai berikut :

- 1) Predikat AKIP pada tahun 2024 telah memenuhi capaian target kinerja yaitu 100% dengan nilai BB, capaian kinerja sama dengan tahun 2023 yaitu 100%



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

dari penilaian Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hal ini dikarenakan pelatihan penyusunan SAKIP bagi petugas pembuat laporan SAKIP dilakukan setiap tahun, sehingga pembuatan dokumen SAKIP dapat di selesaikan dengan baik. Nilai BB menandakan bahwa sudah terdapat keselarasan antara perencanaan, penganggaran, sistem pelaporan kinerja dan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

- 2) Laporan Keuangan sesuai SAP pada tahun 2024 dilihat pada tabel di atas telah mencapai target yaitu sesuai (100%), sama seperti tahun 2023 hal ini dikarenakan Kesesuaian Laporan keuangan yang disajikan oleh Dinas Kesehatan telah mengikuti aturan yang berlaku.

Analisa dari capaian Indikator sasaran dari sasaran strategis peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Predikat AKIP

Predikat AKIP didapatkan dari evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan pada perangkat daerah oleh pihak berwenang untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah , baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	6,00	6,30	10,50	22,80
Pengukuran Kinerja	30	5,40	7,20	10,50	23,10
Pelaporan Kinerja	15	2,10	3,15	6,00	11,25
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	4,50	5,25	10,00	19,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	18,00	21,90	37,00	76,91



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023, nilai tersebut (76,91) termasuk dalam kategori “BB”, kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya (2023) dengan nilai sebesar (72,66) termasuk kategori “BB”.

b. Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

SAP Berbasis Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Manfaat dari basis akrual ini adalah memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Perubahan dari cash basis (PP No. 24 Tahun 2005) ke akrual basis (PP No. 71 Tahun 2010) tentu berdampak pada perubahan unsur laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh pemerintah, perubahan tersebut tergambar dalam tabel berikut:

PP No. 24 Tahun 2005 (Cash Basis)	PP No. 71 Tahun 2010 (Akrual Basis)
1. Laporan Keuangan Pokok yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan	1. Laporan Pelaksanaan Anggaran (Budgetary Reports), terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih 2. Laporan Keuangan yang terdiri dari: 1. Neraca 2. Laporan Operasional atau Laporan Kinerja Keuangan (LKK) 3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 4. Laporan Arus Kas 5. Catatan atas laporan Keuangan
Catatan: Entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan Kinerja Keuangan (LKK) dan Laporan	Catatan: Entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain/ atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan



Perubahan Ekuaitas (LPE)	perundang-undangan.
--------------------------	---------------------

Sesuai dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara diketahui bahwa kriteria pemberian opini laporan keuangan oleh BPK adalah: **Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah**, Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosure*), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern. Kriteria tersebut memberi gambaran bahwa penerapan SAP merupakan salah satu unsur dalam BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, hal ini ditandai dengan BPK memberikan opini laporan keuangan pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dana yang ditargetkan untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 56.130.638.032,- dengan realisasi Rp. 52.667.723.495,- (93,83%).

Keberhasilan sasaran ini didukung oleh pelaksanaan program sebagai berikut:

- a. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 63.997.399.667,- dan realisasi sebesar Rp. 62.496.742.751,- (97,66%)
- b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 631.284.900,- dan realisasi sebesar Rp. 545.313.130,- (86,38%)

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2024 dana APBD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 16
Capaian Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.253.168.207	71.855.878.393	3.397.289.814	95,49
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.224.795.000	1.195.224.987	29.570.013	97,59
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.189.980.000	1.165.174.987	24.805.013	97,92
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.815.000	30.050.000	4.765.000	86,31
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.507.011.523	59.303.286.885	1.203.724.638	98,01
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	57.136.995.423	56.398.554.385	738.441.038	98,71
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	3.370.016.100	2,904.732.500	465.283.600	86,19
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	291.025.000	249.107.489	41.917.511	85,6
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34.000.000	34.000.000	0	100
1.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	38.015.000	35.560.000	2.455.000	93,54
1.3.3	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	150.000.000	147.967.640	2.032.360	98,65
1.3.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	9.668.000	8.240.000	1.428.000	85,23
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	628.560.144	577.284.763	51.275.381	91,84
1.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	22.866.000	22.836.000	30.000	99,87
1.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	75.313.761	72.125.656	3.188.105	95,77
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	312.686.783	312.477.800	208.983	99,93
1.4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	61.443.600	59.525.760	1.917.840	96,88
1.4.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	15,000,000	8.200,000	6.800.000	54,67
1.4.6	Fasilitas kunjungan tamu	41.250.000	2.193.000	39.057.000	5,32
1.4.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100.000,000	99.926.547	73.453	99,93
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.052.200.000	983.500.000	68.700.000	93,47
1.5.1	Pengadaan Mebel	387.700,000	387.600.000	100.000	99,97
1.5.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	129.500,000	126.900,000	2.600,000	97,99
1.5.3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	535.000.000	469.000.000	66.000.000	87,66
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.500,000	198.888.918	31.611.082	86,29
1.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	230.500,000	198.888.918	31.611,082	86,29



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.650.000	160.757.198	111.892.802	58,96
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	183.450.000	121.667.198	61.782.802	66,32
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	19.200.000	19.170.000	30.000	99,84
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	19.920.000	50.080.000	28,46
1.8	Peningkatan Pelayanan BLUD	11.105.768.540	9.211.168.002	1.894.600.538	82,94
1.8.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	11.105.768.540	9.211.168.002	1.894.600.538	82,94
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT	48.405.283.243	44.101.776.585	4.303.506.658	91,11
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota :	21.620.042.083	20.786.925.776	833.116.307	96,15
2.1.1	Pembangunan Puskesmas	5.111.650.000	4.797.494.200	314.155.800	93,85
2.1.2	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	2.907.175.800	2.874.399.725	32.776.075	98,87
2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	7.117.490.000	6.812.251.058	305.238.942	95,71
2.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.056.620.000	1.915.047.104	141.572.896	93,12
2.1.5	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	643.472.100	640.952.500	2.519.600	99,61
2.1.6	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	57.079.000	56.893.500	185.500	99,68
2.1.7	Pengadaan Obat, Bahan Pakai Habis, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.222.424.280	3.200.390.137	22.034.143	99,32
2.1.8	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	426.131.103	422.680.052	3.451.051	99,19
2.1.9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	77.999.800	66.817.500	11.182.300	85,66
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :	26.153.956.260	23.769.537.679	3.384.418.581	87,06
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	534.210.000	516.308.320	17.901.680	96,65
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	144.680.000	98.364.000	46.316.000	67,99
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	64.880.000	64.880.000	0	100
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.034.180.000	999.235.000	34.945.000	96,62
2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.350.000	3.600.000	750.000	82,76
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	396.000.000	394.460.000	1.540.000	99,61



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	111.339.000	108.635.000	2.704.000	97,57
2.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	31.180.000	17.800.000	13.380.000	57,09
2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana dan atau berpotensi bencana	10.000.000	3.680.000	6.320.000	36,80
2.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.501.912.000	2.268.811.557	1.233.100.443	64,79
2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	440.455.000	428.398.000	12.057.000	97,26
2.2.12	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	416.297.100	387.423.484	28.873.616	93,06
2.2.13	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	505.307.800	436.788.900	68.518.900	86,44
2.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	13.000.000	12.845.041	154.959	98,81
2.2.15	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.031.364.300	3.856.488.060	174.876.240	95,66
2.2.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.477.080.000	5.429.773.394	47.306.606	99,14
2.2.17	Pengambilan dan Pengiriman Specimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	47.000.000	37.266.810	9.733.190	79,29
2.2.18	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	596.632.400	467.655.235	128.977.165	78,38
2.2.19	Operasional Pelayanan Puskesmas	6.570.423.260	5.237.896.508	1.332.526.752	79,72
2.2.20	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota	297.807.000	268.462.000	29.345.000	90,15
2.2.21	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	62.250.000	34.090.000	28.160.000	54,76
2.2.22	Penelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	134.230.000	129.705.000	4.525.000	96,63
2.2.23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	95.205.600	92.219.850	2.985.750	96,86
2.2.24	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1.557.797.800	1.405.067.980	152.729.820	90,20
2.2.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	12.320.000	6.450.000	5.870.000	52,35
2.2.26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	64.055.000	63.233.540	821.460	98,72
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	631.284.900	545.313.130	85.971.770	86,38
2.3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	631.284.900	545.313.130	85.971.770	86,38
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.137.058.134	1.042.610.051	94.448.083	91,69
3.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	84.340.000	82.403.800	1.936.200	97,70
3.1.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	20.000.000	19.913.800	86.200	99,57
3.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	64.340.000	62.490.000	1.850.000	97,12
3.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.052.718.134	960.206.251	92.511.883	91,21
3.2.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.052.718.134	960.206.251	92.511.883	91,21



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	430.831.000	380.090.075	50.740.925	88,22
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000	56.691.500	7.038.500	88,96
4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000	56.691.500	7.038.500	88,96
4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	192.387.000	159.237.600	33.149.400	82,77
4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	192.387.000	159.237.600	33.149.400	82,77
4.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	174.714.000	164.160.975	10.553.025	93,96
4.3.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	174.714.000	164.160.975	10.553.025	93,96
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	149.574.400	84.550.000	65.024.400	56,53
5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.535.000	33.480.000	34.055.000	49,57
5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	67.535.000	33.480.000	34.055.000	49,57
5.2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	82.039.400	51.070.000	30.969.400	62,25
5.2.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	82.039.400	51.070.000	30.969.400	62,25
	Jumlah	125.375.914.984	117.464.905.104	7.911.009.880	93,69

Tabel 17
Target dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2024

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
1	BELANJA OPERASI	104.994.463.214	98.066.644.132,69	93,40
2	BELANJA MODAL	20.381.451.770	19.398.260.972	95,18



TOTAL BELANJA	125.375.914.984	117.464.905.104,69	93,69
----------------------	------------------------	---------------------------	--------------

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah anggaran Dinas Kesehatan sebesar **Rp 125.375.914.984,-** dengan realisasi sebesar **Rp 117.464.905.104,69,-** Dari sisi penilaian efisiensi, Dinas Kesehatan menunjukkan efisiensi yang tinggi mengingat capaian kinerja yang diperolehnya. Dimana penyerapan anggaran total sebesar 93,69% dengan pencapaian kinerja yang sangat baik mencapai 95,6%.

3.4 Strategi dan Pemecahan Masalah

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 beserta strategi pemecahan masalah, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 18
Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No	Permasalahan	Strategi Pemecahan Masalah
1	Masih tingginya angka Stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Konvergensi Lintas Sektor dalam rangka penurunan stunting di Desa dan Kelurahan Lokus stunting• Pemberian Makanan Tambahan Bergizi pada balita stunting dan Ibu Hamil KEK• Melaksanakan skrining status Hb dan skrining kesehatan remaja di sekolah
2	Masih tingginya persentase merokok dalam keluarga	Peningkatan Pemahaman tentang bahaya merokok dikalangan keluarga
3	Masih rendahnya cakupan Keluarga dengan Sanitasi Layak	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang penggunaan jamban sehat di keluarga• Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kegiatan pembuatan jamban sehat melalui dana CSR• Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2024

No	Permasalahan	Strategi Pemecahan Masalah
4	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum sesuai dengan harapan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemahaman secara menyeluruh terhadap tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan nomor 6 tahun 2024• Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan terkait SPM• Peningkatan peran serta dari lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten• Melakukan Monev SPM secara berkala dengan Puskesmas guna mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi
5	Sarana, prasarana dan alat kesehatan yang belum sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan sarpras dan alkes diusulkan melalui dana DAK, APBD, atau pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku• Meningkatkan pemanfaatan aplikasi aspak dengan selalu melakukan updating data• Melaksanakan Kalibrasi alat kesehatan secara berkala
6	9 jenis tenaga kesehatan belum terpenuhi untuk 17 puskesmas	Pemenuhan 9 jenis tenaga diusulkan melalui program nusantara sehat, rekrutmen nakes dengan pemanfaatan dana DAK non fisik melalui pembiayaan BOK Puskesmas, serta dana APBD



BAB 4 **PENUTUP**

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 secara umum 92,2%. Sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 – 2026. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada Pemerintah. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam perencanaan kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Dinas Kesehatan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja pada 5 (lima) program yang mendukung tercapainya indikator sasaran dan capaian kinerja Dinas Kesehatan.

Dari angka pencapaian kinerja tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam tujuan menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia aparatur, sedangkan lingkup eksternal mencakup sikap masyarakat yang masih rendah pengetahuannya terhadap kesehatan, sehingga dapat dikatakan bahwa angka- angka tersebut cukup memberikan kebanggaan kepada kita yang pada hakekatnya merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak dilingkup organisasi Dinas Kesehatan. Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang.